

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 17 TAHUN 2002
TENTANG
PERHITUNGAN ANGGARAN NEGARA TAHUN ANGGARAN 2000

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa Perhitungan Anggaran Negara sebagai tahap akhir dari rangkaian siklus anggaran negara merupakan pertanggungjawaban Pemerintah sesuai konstitusi atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Undang-undang tentang Perhitungan Anggaran Negara Tahun Anggaran 2000;
- Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (2), Pasal 23 ayat (1) dan Pasal 23E Undang-Undang Dasar 1945 sebagaimana telah diubah dengan Perubahan Ketiga Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang-undang Perbendaharaan Indonesia (*Indische Comptabiliteitswet Stbl.* Tahun 1925 Nomor 448) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 1968 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2860);
3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1973 tentang Badan Pemeriksa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1973 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3010);
4. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2000 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3944) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4047);

Dengan persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG PERHITUNGAN ANGGARAN NEGARA TAHUN ANGGARAN 2000.

Pasal 1

- (1) Realisasi Anggaran Pendapatan Negara Tahun Anggaran 2000 diperoleh dari sumber-sumber :
- a. Penerimaan Perpajakan;
- b. Penerimaan Negara Bukan Pajak;
- c. Penerimaan Hibah.
- (2) Realisasi Penerimaan Perpajakan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a adalah sebesar Rp 115.912.553.967.084,00 (seratus lima belas triliun sembilan ratus dua belas miliar lima ratus lima puluh tiga juta sembilan ratus enam puluh tujuh ribu delapan puluh empat rupiah).
- (3) Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b adalah sebesar Rp 89.421.950.235.975,00 (delapan puluh sembilan triliun empat ratus dua puluh

satu miliar sembilan ratus lima puluh juta dua ratus tiga puluh lima ribu sembilan ratus tujuh puluh lima rupiah).

- (4) Realisasi Penerimaan Hibah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c adalah sebesar Rp 0,00 (nihil).
- (5) Jumlah Realisasi Anggaran Pendapatan Negara Tahun Anggaran 2000 sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) adalah sebesar Rp 205.334.504.203.059,00 (dua ratus lima triliun tiga ratus tiga puluh empat miliar lima ratus empat juta dua ratus tiga puluh lima puluh sembilan rupiah).

Pasal 2

- (1) Realisasi Penerimaan Perpajakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) terdiri dari :
 - a. Realisasi Penerimaan Pajak Dalam Negeri;
 - b. Realisasi Penerimaan Pajak Perdagangan Internasional.
- (2) Realisasi Penerimaan Pajak Dalam Negeri sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a adalah sebesar Rp108.884.226.302.945,00 (seratus delapan triliun delapan ratus delapan puluh empat miliar dua ratus dua puluh enam juta tiga ratus dua ribu sembilan ratus empat puluh lima rupiah).
- (3) Realisasi Penerimaan Pajak Perdagangan Internasional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b adalah sebesar Rp 7.028.327.664.139,00 (tujuh triliun dua puluh delapan miliar tiga ratus dua puluh tujuh juta enam ratus enam puluh empat ribu seratus tiga puluh sembilan rupiah).
- (4) Jumlah Realisasi Penerimaan Perpajakan Tahun Anggaran 2000 sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan ayat (3) adalah sebesar Rp 115.912.553.967.084,00 (seratus lima belas triliun sembilan ratus dua belas miliar lima ratus lima puluh tiga juta sembilan ratus enam puluh tujuh ribu delapan puluh empat rupiah).
- (5) Rincian Realisasi Penerimaan Perpajakan Tahun Anggaran 2000 sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) dicantumkan dalam penjelasan ayat ini.

Pasal 3

- (1) Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (3) terdiri dari :
 - a. Realisasi Penerimaan Sumber Daya Alam;
 - b. Realisasi Bagian Pemerintah atas Laba Badan Usaha Milik Negara;
 - c. Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya.
- (2) Realisasi Penerimaan Sumber Daya Alam sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a adalah sebesar Rp 76.290.055.913.055,00 (tujuh puluh enam triliun dua ratus sembilan puluh miliar lima puluh lima juta sembilan ratus tiga belas ribu lima puluh lima rupiah).
- (3) Realisasi Bagian Pemerintah atas Laba Badan Usaha Milik Negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b adalah sebesar Rp 4.017.807.791.740,00 (empat triliun tujuh belas miliar delapan ratus tujuh juta tujuh ratus sembilan puluh satu ribu tujuh ratus empat puluh rupiah).
- (4) Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c adalah sebesar Rp 9.114.086.531.180,00 (sembilan triliun seratus empat belas miliar delapan puluh enam juta lima ratus tiga puluh satu ribu seratus delapan puluh rupiah).
- (5) Jumlah Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak Tahun Anggaran 2000 sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) adalah sebesar Rp 89.421.950.235.975,00 (delapan puluh sembilan triliun empat ratus dua puluh satu miliar sembilan ratus lima puluh juta dua ratus tiga puluh lima ribu sembilan ratus tujuh puluh lima rupiah).
- (6) Rincian Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak Tahun Anggaran 2000 sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) dicantumkan dalam penjelasan ayat ini.

Pasal 4

- (1) Realisasi Anggaran Belanja Negara Tahun Anggaran 2000 terdiri dari :
 - a. Pengeluaran Rutin;
 - b. Pengeluaran Pembangunan.
- (2) Realisasi Pengeluaran Rutin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a adalah sebesar Rp 178.587.403.644.090,00 (seratus tujuh puluh delapan triliun lima ratus delapan puluh tujuh miliar empat ratus tiga juta enam ratus empat puluh empat ribu sembilan puluh rupiah).
- (3) Realisasi Pengeluaran Pembangunan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b adalah sebesar Rp 42.879.335.101.297,00 (empat puluh dua triliun delapan ratus tujuh puluh sembilan miliar tiga ratus tiga puluh lima juta seratus satu ribu dua ratus sembilan puluh tujuh rupiah).
- (4) Jumlah Realisasi Pengeluaran Rutin Tahun Anggaran 2000 dan Realisasi Pengeluaran Pembangunan Tahun Anggaran 2000 sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan ayat (3) adalah sebesar Rp 221.466.738.745.387,00 (dua ratus dua puluh satu triliun empat ratus enam puluh enam miliar tujuh ratus tiga puluh delapan juta tujuh ratus empat puluh lima ribu tiga ratus delapan puluh tujuh rupiah).
- (5) Rincian Realisasi Pengeluaran Rutin dan Realisasi Pengeluaran Pembangunan Tahun Anggaran 2000 sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) ke dalam Sektor dan Subsektor dicantumkan dalam penjelasan ayat ini.

Pasal 5

- (1) Dengan jumlah realisasi Anggaran Pendapatan Negara Tahun Anggaran 2000 sebesar Rp 205.334.504.203.059,00 (dua ratus lima triliun tiga ratus tiga puluh empat miliar lima ratus empat juta dua ratus tiga ribu lima puluh sembilan rupiah) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (5), lebih kecil dari jumlah realisasi Anggaran Belanja Negara Tahun Anggaran 2000 sebesar Rp 221.466.738.745.387,00 (dua ratus dua puluh satu triliun empat ratus enam puluh enam miliar tujuh ratus tiga puluh delapan juta tujuh ratus empat puluh lima ribu tiga ratus delapan puluh tujuh rupiah) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4), maka dalam Tahun Anggaran 2000 terdapat defisit anggaran sebesar Rp 16.132.234.542.328,00 (enam belas triliun seratus tiga puluh dua miliar dua ratus tiga puluh empat juta lima ratus empat puluh dua ribu tiga ratus dua puluh delapan rupiah), yang dibiayai dari Pembiayaan Defisit Anggaran.
- (2) Realisasi Pembiayaan Defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2000 sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diperoleh dari sumber-sumber :
 - a. Pembiayaan Dalam Negeri sebesar Rp 18.900.000.000.000,00 (delapan belas triliun sembilan ratus miliar rupiah);
 - b. Pembiayaan Luar Negeri Bersih sebesar Rp 10.195.669.541.708,00 (sepuluh triliun seratus sembilan puluh lima miliar enam ratus enam puluh sembilan juta lima ratus empat puluh satu ribu tujuh ratus delapan rupiah).
- (3) Rincian Realisasi Pembiayaan Defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2000 sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dicantumkan dalam penjelasan ayat ini.

Pasal 6

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Anggaran 2000 adalah sebesar Rp 12.963.434.999.380,00 (dua belas triliun sembilan ratus enam puluh tiga miliar empat ratus tiga puluh empat juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu tiga ratus delapan puluh rupiah) yang akan menambah Sisa Anggaran Lebih tahun-tahun anggaran sebelumnya, dan dapat dipergunakan sebagai dana talangan pelaksanaan anggaran tahun-tahun berikutnya.

Pasal 7

Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta
pada tanggal 28 Juni 2002
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd

MEGAWATI SOEKARNOPUTRI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 28 Juni 2002
SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA,
ttd

BAMBANG KESOWO

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2002 NOMOR 69

PENJELASAN
ATAS
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 17 TAHUN 2002
TENTANG
PERHITUNGAN ANGGARAN NEGARA TAHUN ANGGARAN 2000

UMUM

Perhitungan Anggaran Negara Tahun Anggaran 2000 setelah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia diajukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat untuk memenuhi kewajiban melaksanakan perhitungan dan pertanggungjawaban Pemerintah atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2000, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2000 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2000.

Dalam Perhitungan Anggaran Negara Tahun Anggaran 2000 tersebut terdapat Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran sebesar Rp 12.963.434.999.380,00 (dua belas triliun sembilan ratus enam puluh tiga miliar empat ratus tiga puluh empat juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu tiga ratus delapan puluh rupiah).

Sisa Anggaran Lebih kumulatif sampai dengan Tahun Anggaran 1999/2000 sebesar Rp 14.692.555.080.805,00 (empat belas triliun enam ratus sembilan puluh dua miliar lima ratus lima puluh lima juta delapan puluh ribu delapan ratus lima puluh rupiah).

Sisa Anggaran Lebih kumulatif sampai dengan Tahun Anggaran 2000 menjadi sebesar Rp 27.655.990.080.185,00 (dua puluh tujuh triliun enam ratus lima puluh lima miliar sembilan ratus sembilan puluh juta delapan puluh ribu seratus delapan puluh lima rupiah). Jumlah Sisa Anggaran Lebih kumulatif tersebut termasuk Cadangan Anggaran Pembangunan (CAP) sebesar Rp 1.730.000.000.000,00 (satu triliun tujuh ratus tiga puluh miliar rupiah).

PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Penerimaan Perpajakan sebesar Rp 115.912.553.967.084,00 yang terdiri dari :

- a. Pajak dalam negeri Rp 108.884.226.302.945,00
 - 0110 Pajak penghasilan Nonmigas Rp 38.421.473.603.095,00
 - 0120 Pajak penghasilan migas Rp

| | | |
|------|---|--------------------------|
| | 18.651.550.493.621,00 | |
| 0130 | Pajak pertambahan nilai barang dan jasa, dan pajak penjualan atas barang mewah (PPN dan PPnBM) Rp | 35.231.786.984.010,00 |
| 0140 | Pajak bumi dan bangunan (PBB) | Rp 3.525.326.197.974,00 |
| 0150 | Bea perolehan atas tanah dan bangunan (BPHTB) | Rp 930.787.751.768,00 |
| 0160 | Cukai | Rp 11.286.606.555.345,00 |
| 0170 | Pajak lainnya (Bea meterai) | Rp 836.694.717.132,00 |
| b. | Pajak perdagangan internasional | Rp 7.028.327.664.139,00 |
| 0210 | Bea masuk | Rp 6.697.068.981.518,00 |
| 0230 | Pungutan (pajak) ekspor | Rp 331.258.682.621,00 |

Pasal 3

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Penerimaan Negara Bukan Pajak sebesar Rp 89.421.950.235.975,00 yang terdiri dari :

| | | |
|------|---|--------------------------|
| a. | Penerimaan sumber daya alam | Rp 76.290.055.913.055,00 |
| 0310 | Penerimaan minyak bumi | Rp 50.953.017.680.978,00 |
| 0320 | Penerimaan gas alam | Rp 15.707.944.490.800,00 |
| 0330 | Penerimaan pertambangan umum | Rp 856.869.752.730,00 |
| 0340 | Penerimaan kehutanan | Rp 8.719.284.333.817,00 |
| 0350 | Penerimaan perikanan | Rp 52.939.654.730,00 |
| b. | Bagian Pemerintah atas laba badan usaha milik Negara | Rp 4.017.807.791.740,00 |
| 0410 | Bagian laba dari BUMN | Rp 4.017.807.791.740,00 |
| c. | Penerimaan Negara Bukan Pajak lainnya | Rp 9.114.086.531.180,00 |
| 0510 | Penjualan hasil produksi, sitaan | Rp 35.720.453.616,00 |
| 0511 | Penjualan hasil pertanian, perkebunan | Rp 1.716.577.296,00 |
| 0512 | Penjualan hasil peternakan | Rp 2.000.612.373,00 |
| 0513 | Penjualan hasil perikanan | Rp 946.493.808,00 |
| 0514 | Penjualan hasil sitaan | Rp 11.968.742.277,00 |
| 0515 | Penjualan obat-obatan dan hasil farmasi lainnya | Rp 183.501.009,00 |
| 0516 | Penjualan penerbitan, film, dan hasil cetakan lainnya | Rp 197.869.948,00 |

| | |
|------|--|
| 0517 | Penjualan dokumen-dokumen pelelangan Rp 4.033.702.730,00 |
| 0519 | Penjualan lainnya Rp 14.672.954.175,00 |
| 0520 | Penjualan aset tetap Rp 31.651.742.549,00 |
| 0521 | Penjualan rumah, gedung, bangunan, dan tanah Rp 5.249.863.976,00 |
| 0522 | Penjualan kendaraan bermotor Rp 601.075.954,00 |
| 0523 | Penjualan sewa beli Rp 18.413.519.233,00 |
| 0529 | Penjualan aset lainnya yang berlebih, rusak, dihapuskan Rp 7.387.283.386,00 |
| 0530 | Pendapatan sewa Rp 9.691.207.886,00 |
| 0531 | Sewa rumah dinas, rumah negeri Rp 3.755.932.445,00 |
| 0532 | Sewa gedung, bangunan, gudang Rp 3.507.954.329,00 |
| 0533 | Sewa benda-benda bergerak Rp 1.663.376.092,00 |
| 0539 | Sewa benda-benda tak bergerak lainnya Rp 763.945.020,00 |
| 0540 | Pendapatan jasa I Rp 460.738.215.475,00 |
| 0541 | Pendapatan rumah sakit dan instansi kesehatan lainnya Rp 37.353.191.541,00 |
| 0542 | Pendapatan tempat hiburan, taman, museum Rp 362.710.465,00 |
| 0543 | Pendapatan surat keterangan, visa, paspor, dan SIM, STNK, BPKB Rp 208.609.744.886,00 |
| 0544 | Pendapatan jasa pertanahan Rp 10.592.429.472,00 |
| 0545 | Pendapatan hak dan perijinan Rp 164.031.437.689,00 |
| 0546 | Pendapatan sensor, karantina, pengawasan, pemeriksaan Rp 7.647.798.492,00 |
| 0547 | Pendapatan jasa tenaga, jasa pekerjaan Rp 6.631.993.783,00 |
| 0548 | Pendapatan jasa Kantor Urusan Agama Rp 3.468.013.155,00 |
| 0549 | Pendapatan jasa bandar udara dan pelabuhan Rp 22.040.895.992,00 |
| 0550 | Pendapatan jasa II Rp 853.922.833.398,00 |
| 0551 | Pendapatan jasa lembaga keuangan (jasa giro) Rp 70.087.715.652,00 |
| 0552 | Pendapatan iuran hasil hutan, hasil laut, royalti dan denda Rp 307.501.493.126,00 |
| 0553 | Pendapatan iuran lelang untuk fakir miskin Rp 10.189.941.146,00 |
| 0554 | Pendapatan jasa Kantor Catatan Sipil Rp 5.045.402.018,00 |
| 0555 | Pendapatan biaya penagihan pajak-pajak negara dengan surat paksa Rp 2.236.312.541,00 |
| 0556 | Pendapatan uang pewarganegaraan Rp 6.975.294.693,00 |
| 0557 | Pendapatan bea lelang Rp 132.792.250.618,00 |
| 0558 | Pendapatan biaya pengurusan piutang negara dan lelang negara Rp 42.219.640.368,00 |
| 0559 | Pendapatan jasa lainnya Rp 276.874.783.236,00 |
| 0560 | Pendapatan rutin dari luar negeri Rp 87.404.370.945,00 |
| 0580 | Pendapatan penjualan, sewa dan jasa swadana Rp 621.629.727.512,00 |
| 0581 | Pendapatan penjualan swadana Rp 5.496.146.964,00 |
| 0582 | Pendapatan sewa swadana Rp 2.984.750.516,00 |
| 0583 | Pendapatan jasa swadana Rp 613.148.830.032,00 |
| 0610 | Pendapatan kejaksaan dan peradilan Rp 24.750.756.622,00 |
| 0611 | Legalisasi tanda tangan Rp 122.707.964,00 |
| 0612 | Pengesahan surat di bawah tangan Rp 14.038.450,00 |

| | |
|------|---|
| 0613 | Uang meja (leges) dan upah pada panitera badan pengadilan Rp 764.937.469,00 |
| 0614 | Hasil denda, denda tilang dan sebagainya Rp 11.637.328.085,00 |
| 0615 | Ongkos perkara Rp 991.040.729,00 |
| 0619 | Penerimaan kejaksaan dan peradilan lainnya Rp11.220.703.925,00 |
| 0710 | Pendapatan pendidikan Rp 7.971.369.764,00 |
| 0711 | Uang pendidikan Rp 3.683.969.372,00 |
| 0712 | Uang ujian masuk, kenaikan tingkat, dan akhir pendidikan Rp3.706.365.559,00 |
| 0713 | Uang ujian untuk menjalankan praktek Rp 57.493.000,00 |
| 0719 | Pendapatan pendidikan lainnya Rp 523.541.833,00 |
| 0780 | Pendapatan pendidikan swadana Rp 604.755.627.475,00 |
| 0781 | Pendapatan pendidikan swadana Rp 604.755.627.475,00 |
| 0810 | Pendapatan kembali belanja tahun anggaran berjalan Rp179.757.894.291,00 |
| 0811 | Penerimaan kembali belanja pegawai pusat Rp85.644.933.166,00 |
| 0812 | Penerimaan kembali belanja daerah otonom Rp 21.756.648.972,00 |
| 0813 | Penerimaan kembali belanja pensiun Rp 50.585.706.785,00 |
| 0814 | Penerimaan kembali belanja rutin lainnya Rp 10.651.133.219,00 |
| 0815 | Penerimaan kembali belanja pembangunan rupiah murni Rp11.119.472.149,00 |
| 0820 | Pendapatan dari penerimaan kembali belanja tahun anggaran yang lalu Rp 599.335.922.711,00 |
| 0821 | Penerimaan kembali belanja pegawai pusat Rp67.334.191.753,00 |
| 0822 | Penerimaan kembali belanja pegawai otonom Rp3.014.469.225,00 |
| 0823 | Penerimaan kembali belanja pensiun Rp 5.952.669.476,00 |
| 0824 | Penerimaan kembali belanja rutin lainnya Rp236.559.273.414,00 |
| 0825 | Penerimaan kembali belanja pembangunan rupiah murni Rp286.475.318.843,00 |
| 0840 | Pendapatan pelunasan piutang Rp 4.989.842.187.810,00 |
| 0841 | Pendapatan pelunasan piutang Rp 4.989.842.187.810,00 |
| 0880 | Pendapatan lain-lain swadana Rp 10.238.344.589,00 |
| 0881 | Pendapatan lain-lain swadana Rp 10.238.344.589,00 |
| 0890 | Pendapatan lain-lain Rp 596.675.876.537,00 |
| 0891 | Penerimaan kembali persekot, uang muka gaji Rp 2.227.858.755,00 |
| 0892 | Penerimaan denda keterlambatan penyelesaian pekerjaan Rp 16.323.365.048,00 |
| 0893 | Penerimaan kembali ganti rugi atas kerugian yang diderita oleh negara Rp 6.201.984.493,00 |
| 0894 | Penerimaan kembali perhitungan sisa lebih subsidi gaji PNS daerah otonom berdasarkan SPM nihil KPKN Rp 54.924.339,00 |
| 0895 | Pendapatan atas denda administrasi BPHTB ----- |
| 0899 | Pendapatan anggaran lainnya Rp 571.867.743.902,00 |

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Pengeluaran rutin sebesar Rp 178.587.403.644.090,00 terdiri dari :

| | | | | |
|------|--|----|------------------------|------|
| 01 | Sektor Industri | Rp | 82.999.609.292,00 | |
| 01.1 | Subsektor Industri | Rp | 82.999.609.292,00 | |
| 02 | Sektor Pertanian dan Kehutanan | Rp | 819.564.808.952,00 | |
| 02.1 | Subsektor Pertanian | Rp | 251.335.711.110,00 | |
| 02.2 | Subsektor Kehutanan | Rp | 568.229.097.842,00 | |
| 03 | Sektor Pengairan | Rp | 26.183.455.264,00 | |
| 03.1 | Subsektor Pengembangan Sumber Daya Air | | --- | |
| 03.2 | Subsektor Irigasi | Rp | 26.183.455.264,00 | |
| 04 | Sektor Tenaga Kerja | Rp | 313.459.497.009,00 | |
| 04.1 | Subsektor Tenaga Kerja | Rp | 13.459.497.009,00 | |
| 05 | Sektor Perdagangan, Pengembangan USAHA NASIONAL, KEUANGAN DAN Koperasi | Rp | 134.924.474.286.930,00 | 05.1 |
| | Subsektor Perdagangan Dalam Negeri | Rp | 80.276.768.883,00 | |
| 05.2 | Subsektor Perdagangan Luar Negeri | Rp | 54.064.625.714,00 | |
| 05.3 | Subsektor Pengembangan Usaha Nasional | | --- | |
| 05.4 | Subsektor Keuangan | Rp | 34.764.872.315.849,00 | |
| 05.5 | Subsektor Koperasi dan Pengusaha Kecil | Rp | 25.260.576.484,00 | |
| 06 | Sektor Transportasi, Meteorologi DAN Geofisika | Rp | 336.705.103.355,00 | |
| 06.1 | Subsektor Prasarana Jalan | Rp | 17.235.345.259,00 | |
| 06.2 | Subsektor Transportasi Darat | Rp | 29.390.770.362,00 | |
| 06.3 | Subsektor Transportasi | Rp | 174.679.865.922,00 | |

| | | | |
|------|--|--------------------------|------|
| | Laut | | |
| 06.4 | Subsektor Transportasi Udara | Rp 61.033.936.662,00 | |
| 06.5 | Subsektor Meteorologi, Geofisika, Pencarian dan Penyelamatan (SAR) | Rp 54.365.185.150,00 | |
| 07 | Sektor Pertambangan dan Energi | Rp 337.156.838.428,00 | |
| 07.1 | Subsektor Pertambangan | Rp 331.007.623.985,00 | |
| 07.2 | Subsektor Energi | Rp 6.149.214.443,00 | |
| 08 | Sektor Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi | Rp 132.533.603.747,00 | |
| 08.1 | Subsektor Pariwisata | Rp 53.205.992.268,00 | |
| 08.2 | Subsektor Pos dan Telekomunikasi | Rp 79.327.611.479,00 | |
| 09 | Sektor Pembangunan Sarah dan Transmigrasi | Rp 16.105.800.068.662,00 | |
| 09.1 | Subsektor Pembangunan Daerah | Rp 16.090.648.923.114,00 | |
| 09.2 | Subsektor Transmigrasi dan Pemukiman Perambah Hutan | Rp 15.151.145.548,00 | |
| 10 | Sektor Lingkungan Hidup dan Tata Ruang | Rp 267.234.076.637,00 | |
| 10.1 | Subsektor Lingkungan Hidup | Rp 10.876.054.683,00 | |
| 10.2 | Subsektor Tata Ruang | Rp 256.358.021.954,00 | |
| 11 | Sektor Pendidikan, Kebudayaan Nasional, Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa, Pemuda dan Olah raga | Rp 6.987.253.174.111,00 | |
| | Subsektor Pendidikan | Rp 6.504.897.254.250,00 | 11.1 |
| 11.2 | Subsektor Pendidikan Luar Sekolah dan Kedinasan | Rp 375.343.037.243,00 | |
| 11.3 | Subsektor Kebudayaan Nasional dan Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa | Rp 97.632.075.057,00 | |
| 11.4 | Subsektor Pemuda dan Olah Raga | Rp 9.380.807.561,00 | |
| 12 | Sektor Kependudukan dan KELUARGA Sejahtera | Rp 426.425.433.435,00 | |
| 12.1 | Subsektor Kependudukan dan Keluarga Berencana | Rp 426.425.433.435,00 | |
| 13 | Sektor Kesejahteraan | Rp 680.876.923.001,00 | |

| | | | | |
|-------------|---|--|------|-----------|
| | | Sosial, KESEHATAN, PERANAN WANITA, Anak dan Remaja | | |
| 13.1 | Subsektor Kesejahteraan Sosial | Rp 22.873.159.401,00 | | |
| 13.2 | Subsektor Kesehatan | Rp 658.003.763.600,00 | | |
| 13.3 | Subsektor Peranan Wanita, Anak dan Remaja | --- | | |
| 14 | Sektor Perumahan dan Permukiman | Rp 23.616.506.009,00 | | |
| 14.1 | Subsektor Perumahan dan Permukiman | Rp 23.181.694.155,00 | | |
| 14.2 | Subsektor Penataan Kota dan Bangunan | Rp 434.811.854,00 | | |
| 15 | Sektor Agama | Rp 1.151.755.322.309,00 | | |
| 15.1 | Subsektor Pelayanan Kehidupan Beragama | Rp 261.492.299.429,00 | | |
| 15.2 | Subsektor Pembinaan Pendidikan Agama | Rp 890.263.022.880,00 | | |
| 16 | Sektor Ilmu Pengetahuan dan Teknologi | Rp 435.256.791.450,00 | | |
| 16.1 | Subsektor Teknik Produksi dan Teknologi | ---- | | |
| 16.2 | Subsektor Ilmu Pengetahuan Terapan dan Dasar | Rp 266.698.960.263,00 | | |
| Kelembagaan | Rp 37.918.459.499,00 | | 16.3 | Subsektor |
| | | Prasarana dan Sarana Ilmu Pengetahuan dan Teknologi | | |
| 16.4 | Subsektor Kelautan | --- | | |
| 16.5 | Subsektor Kedirgantaraan | Rp 1.843.320.476,00 | | |
| 16.6 | Subsektor Sistem Informasi dan Statistik | Rp 128.796.051.212,00 | | |
| 17 | Sektor Hukum | Rp 886.156.761.240,00 | | |
| 17.1 | Subsektor Pembinaan Hukum Nasional | Rp 741.085.453.921,00 | | |
| 17.2 | Subsektor Pembinaan Aparatur Hukum | Rp 145.071.307.319,00 | | |
| 17.3 | Subsektor Sarana dan Prasarana Hukum | --- | | |
| 18 | Sektor Aparatur Negara dan Pengawasan | Rp 4.105.151.965.937,00 | | |
| 18.1 | Subsektor Aparatur Negara | Rp 3.799.344.063.390,00 | | |
| 18.2 | Subsektor Pendayagunaan Sistem dan Pelaksanaan Pengawasan | Rp 305.807.902.547,00 | | |

| | | |
|------|--|-------------------------|
| 19 | Sektor Politik, Hubungan Luar NEGERI, Penerangan, Komunikasi dan Media Massa | Rp 1.631.877.071.525,00 |
| 19.1 | Subsektor Politik | Rp 165.141.948.629,00 |
| 19.2 | Subsektor Hubungan Luar Negeri | Rp 1.404.869.832.276,00 |
| 19.3 | Subsektor Penerangan, Komunikasi dan Media Massa | Rp 61.865.290.620,00 |
| 20 | Sektor Pertahanan dan Keamanan | Rp 8.912.922.346.797,00 |
| 20.1 | Subsektor Rakyat Terlatih dan Perlindungan Masyarakat | --- |
| 20.2 | Subsektor Tentara Nasional Indonesia | Rp 5.873.153.805.594,00 |
| 20.3 | Subsektor Kepolisian | Rp 2.983.793.274.203,00 |
| 20.4 | Subsektor Pendukung | Rp 55.975.267.000,00 |

Pengeluaran pembangunan sebesar Rp 42.879.335.101.297,00 terdiri dari pengeluaran pembangunan yang dibiayai rupiah murni (Pembiayaan Rupiah) dan pengeluaran pembangunan yang dibiayai melalui pinjaman proyek (Pembiayaan Proyek):

a. Pengeluaran Pembangunan Pembiayaan Rupiah sebesar Rp 25.909.710.201.956,00 terdiri dari :

| | | | |
|------|--|-----------------------|------|
| 01 | Sektor Industri | Rp 41.981.171.762,00 | |
| 01.1 | Subsektor Industri | Rp 41.981.171.762,00 | |
| 02 | Sektor Pertanian dan Kehutanan | Rp 497.311.358.708,00 | |
| 02.1 | Subsektor Pertanian | Rp 489.631.813.609,00 | |
| 02.2 | Subsektor Kehutanan | Rp 7.679.545.099,00 | |
| 03 | Sektor Pengairan | Rp 670.189.728.713,00 | |
| 03.1 | Subsektor Pengembangan Sumber Daya Air | Rp 269.972.834.384,00 | |
| 03.2 | Subsektor Irigasi | Rp 400.216.894.329,00 | |
| 04 | Sektor Tenaga Kerja | Rp 75.313.109.946,00 | |
| 04.1 | Subsektor Tenaga Kerja | Rp 75.313.109.946,00 | |
| 05 | Sektor Perdagangan, Pengembangan USAHA NASIONAL, KEUANGAN DAN Koperasi | Rp 261.631.171.357,00 | 05.1 |
| | Subsektor Perdagangan Dalam Negeri | Rp 10.355.112.602,00 | |
| 05.2 | Subsektor Perdagangan Luar Negeri | Rp 36.064.010.651,00 | |
| 05.3 | Subsektor Pengembangan Usaha Nasional | Rp 61.392.562.578,00 | |
| 05.4 | Subsektor Keuangan | Rp 28.311.746.950,00 | |
| 05.5 | Subsektor Koperasi | Rp 125.507.738.576,00 | |

dan Pengusaha Kecil

| | | | |
|------|--|----|-----------------------|
| 06 | Sektor Transportasi, Meteorologi DAN Geofisika | Rp | 927.483.880.248,00 |
| 06.1 | Subsektor Prasarana Jalan | Rp | 703.749.975.101,00 |
| 06.2 | Subsektor Transportasi Darat | Rp | 105.893.056.939,00 |
| 06.3 | Subsektor Transportasi Laut | Rp | 41.352.803.628,00 |
| 06.4 | Subsektor Transportasi Udara | Rp | 70.755.817.319,00 |
| 06.5 | Subsektor Meteorologi, Geofisika, Pencarian dan Penyelamatan (SAR) | Rp | 5.732.227.261,00 |
| 07 | Sektor Pertambangan dan Energi | Rp | 382.024.593.421,00 |
| 07.1 | Subsektor Pertambangan | Rp | 36.345.719.851,00 |
| 07.2 | Subsektor Energi | Rp | 345.678.873.570,00 |
| 08 | Sektor Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi | Rp | 30.391.598.819,00 |
| 08.1 | Subsektor Pariwisata | Rp | 23.996.760.557,00 |
| 08.2 | Subsektor Pos dan Telekomunikasi | Rp | 6.394.838.262,00 |
| 09 | Sektor Pembangunan Daerah dan Transmigrasi | Rp | 17.029.275.904.473,00 |
| 09.1 | Subsektor Pembangunan Daerah | Rp | 16.678.740.246.508,00 |
| 09.2 | Subsektor Transmigrasi dan Pemukiman Perambah Hutan | Rp | 50.535.657.965,00 |
| 10 | Sektor Lingkungan Hidup dan Tata Ruang | Rp | 98.568.954.947,00 |
| 10.1 | Subsektor Lingkungan Hidup | Rp | 62.095.924.525,00 |
| 10.2 | Subsektor Tata Ruang | Rp | 36.473.030.422,00 |
| 11 | Sektor Pendidikan, Kebudayaan NASIONAL, Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa, Pemuda dan Olah raga | Rp | 2.410.637.636.685,00 |
| 11.1 | Subsektor Pendidikan | Rp | 2.150.593.899.279,00 |
| 11.2 | Subsektor Pendidikan Luar Sekolah dan Kedinasan | Rp | 190.344.041.472,00 |
| 11.3 | Subsektor Kebudayaan Nasional dan Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang | Rp | 40.334.816.419,00 |

| | | | |
|------|--|----|----------------------|
| 11.4 | Maha Esa Subsektor Pemuda dan Olah Raga | Rp | 29.364.879.515,00 |
| 12 | Sektor Kependudukan dan Keluarga Sejahtera | Rp | 148.547.388.764,00 |
| 12.1 | Subsektor Kependudukan dan Keluarga Berencana | Rp | 148.547.388.764,00 |
| 13 | Sektor Kesejahteraan Sosial, KESEHATAN, PERANAN WANITA, Anak dan Remaja | Rp | 1.134.544.631.772,00 |
| 13.1 | Subsektor Kesejahteraan Sosial | Rp | 140.965.805.855,00 |
| 13.2 | Subsektor Kesehatan | Rp | 642.191.258.357,00 |
| 13.3 | Subsektor Peranan Wanita, Anak dan Remaja | Rp | 351.387.567.560,00 |
| 14 | Sektor Perumahan dan Permukiman | Rp | 232.193.106.890,00 |
| 14.1 | Subsektor Perumahan dan Permukiman | Rp | 226.155.938.436,00 |
| 14.2 | Subsektor Penataan Kota dan Bangunan | Rp | 6.037.168.454,00 |
| 15 | Sektor Agama | Rp | 42.148.866.676,00 |
| 15.1 | Subsektor Pelayanan Kehidupan Beragama | Rp | 20.434.696.093,00 |
| 15.2 | Subsektor Pembinaan Pendidikan Agama | Rp | 21.714.170.583,00 |
| 16 | Sektor Ilmu Pengetahuan dan Teknologi | Rp | 368.290.232.634,00 |
| 16.1 | Subsektor Teknik Produksi dan Teknologi | Rp | 92.393.669.681,00 |
| 16.2 | Subsektor Ilmu Pengetahuan Terapan dan Dasar | Rp | 28.312.227.192,00 |
| 16.3 | Subsektor Kelembagaan Prasarana dan Sarana Ilmu Pengetahuan dan Teknologi | Rp | 42.382.992.615,00 |
| 16.4 | Subsektor Kelautan | Rp | 31.203.593.931,00 |
| 16.5 | Subsektor Kedirgantaraan | Rp | 24.785.625.460,00 |
| 16.6 | Subsektor Sistem Informasi dan Statistik | Rp | 149.212.123.755,00 |
| 17 | Sektor Hukum | Rp | 123.283.533.889,00 |
| 17.1 | Subsektor Pembinaan Hukum Nasional | Rp | 12.755.363.587,00 |
| 17.2 | Subsektor Pembinaan Aparatur Hukum | Rp | 31.273.671.807,00 |
| 17.3 | Subsektor Sarana dan | Rp | 79.254.498.495,00 |

| | | | | | |
|-----------------------|-----------------|--|-------------------------|--------|------------|
| | Prasarana Hukum | | | | |
| | 18 | Sektor Aparatur Negara dan Pengawasan | Rp 443.902.059.808,00 | | |
| | 18.1 | Subsektor Aparatur Negara | Rp 393.454.418.654,00 | | |
| 18.2 | | Subsektor Pendayagunaan Sistem dan Pelaksanaan Pengawasan | Rp 50.447.641.154,00 | | |
| | 19 | Sektor Politik, Hubungan Luar Negeri, Penerangan, Komunikasi dan Media Massa | Rp 38.648.257.494,00 | | |
| | 19.1 | Subsektor Politik | Rp 1.720.576.389,00 | | |
| | 19.2 | Subsektor Hubungan Luar Negeri | Rp 9.837.228.134,00 | | |
| | 19.3 | Subsektor Penerangan, Komunikasi dan Media Massa | Rp 27.090.452.971,00 | | |
| | 20 | Sektor Pertahanan dan Keamanan | Rp 953.343.014.950,00 | | |
| | 20.1 | Subsektor Rakyat Terlatih dan Perlindungan Masyarakat | Rp 625.530.635.965,00 | | 20.2 |
| Subsektor TNI | | | Rp 197.068.860.484,00 | | |
| | 20.3 | Subsektor Kepolisian | Rp 106.676.888.076,00 | | |
| | 20.4 | Subsektor Pendukung | Rp 24.066.630.425,00 | | |
| | b. | Pengeluaran Pembangunan | Pembiayaan | Proyek | sebesar Rp |
| 16.969.624.899.341,00 | | terdiri dari : | | | |
| | 01 | Sektor Industri | Rp 89.324.659.182,00 | | |
| | 01.1 | Subsektor Industri | Rp 89.324.659.182,00 | | |
| | 02 | Sektor Pertanian dan Kehutanan | Rp 1.451.354.654.967,00 | | |
| | 02.1 | Subsektor Pertanian | Rp 1.406.754.251.441,00 | | |
| | 02.2 | Subsektor Kehutanan | Rp 44.600.403.526,00 | | |
| | 03 | Sektor Pengairan | Rp 1.468.933.787.710,00 | | |
| | 03.1 | Subsektor Pengembangan Sumber Daya Air | Rp 1.131.317.802.470,00 | | |
| | 03.2 | Subsektor Irigasi | Rp 337.615.985.240,00 | | |
| | 04 | Sektor Tenaga Kerja | Rp 70.553.052.911,00 | | |
| | 04.1 | Subsektor Tenaga Kerja | Rp 70.553.052.911,00 | | |
| | 05 | Sektor Perdagangan, Pengembangan USAHA NASIONAL, KEUANGAN DAN Koperasi | Rp 1.026.432.130.485,00 | | |
| | 05.1 | Subsektor Perdagangan Dalam Negeri | Rp 134.007.638.692,00 | | |
| | 05.2 | Subsektor Perdagangan | Rp 45.076.973,00 | | |

| | | | |
|------|--|-------------------------|--|
| | Luar Negeri | | |
| 05.3 | Subsektor Pengembangan Usaha Nasional | Rp 5.866.919.635,00 | |
| 05.4 | Subsektor Keuangan | Rp 785.190.374.094,00 | |
| 05.5 | Subsektor Koperasi dan Pengusaha Kecil | Rp 101.322.121.091,00 | |
| 06 | Sektor Transportasi, Meteorologi DAN Geofisika | Rp 2.569.177.051.251,00 | |
| 06.1 | Subsektor Prasarana Jalan | Rp 2.122.496.949.654,00 | |
| 06.2 | Subsektor Transportasi Darat | Rp 322.144.932.732,00 | |
| 06.3 | Subsektor Transportasi Laut | Rp 33.782.475.792,00 | |
| 06.4 | Subsektor Transportasi Udara | Rp 90.752.693.073,00 | |
| 06.5 | Subsektor Meteorologi, Geofisika, Pencarian dan Penyelamatan (SAR) | --- | |
| 07 | Sektor Pertambangan dan Energi | Rp 891.874.021.980,00 | |
| 07.1 | Subsektor Pertambangan | --- | |
| 07.2 | Subsektor Energi | Rp 891.874.021.980,00 | |
| 08 | Sektor Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi | Rp 368.073.940.746,00 | |
| 08.1 | Subsektor Pariwisata | --- | |
| 08.2 | Subsektor Pos dan Telekomunikasi | Rp 368.073.940.746,00 | |
| 09 | Sektor Pembangunan Daerah dan Transmigrasi | Rp 1.963.178.252.309,00 | |
| 09.1 | Subsektor Pembangunan Daerah | Rp 1.963.178.252.309,00 | |
| 09.2 | Subsektor Transmigrasi dan Pemukiman Perambah Hutan | --- | |
| 10 | Sektor Lingkungan Hidup dan Tata RUANG | Rp 487.491.940.334,00 | |
| 10.1 | Subsektor Lingkungan Hidup | Rp 398.194.619.765,00 | |
| 10.2 | Subsektor Tata Ruang | Rp 89.297.320.569,00 | |
| 11 | Sektor Pendidikan, Kebudayaan NASIONAL, Kepercayaan Terhadap Tuhan YANG MAHA Esa, Pemuda dan Olah raga | Rp 2.183.348.583.896,00 | |
| 11.1 | Subsektor Pendidikan | Rp 2.128.179.782.001,00 | |
| 11.2 | Subsektor Pendidikan | Rp 52.829.411.676,00 | |

| | | | |
|------|--|-----|----------------------|
| | Luar Sekolah dan Kedinasan | | |
| 11.3 | Subsektor Kebudayaan Nasional dan Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa | --- | |
| 11.4 | Subsektor Pemuda dan Olah Raga | Rp | 2.339.390.219,00 |
| 12 | Sektor Kependudukan dan Keluarga Sejahtera | Rp | 115.875.190.021,00 |
| 12.1 | Subsektor Kependudukan dan Keluarga Berencana | Rp | 115.875.190.021,00 |
| 13 | Sektor Kesejahteraan Sosial, KESEHATAN, PERANAN WANITA, Anak dan Remaja | Rp | 1.307.517.392.945,00 |
| 13.1 | Subsektor Kesejahteraan Sosial | Rp | 87.659.915.065,00 |
| 13.2 | Subsektor Kesehatan | Rp | 1.219.857.477.880,00 |
| 13.3 | Subsektor Peranan Wanita, Anak dan Remaja | --- | |
| 14 | Sektor Perumahan dan Permukiman | Rp | 2.800.780.410.227,00 |
| 14.1 | Subsektor Perumahan dan Permukiman | Rp | 2.799.099.558.779,00 |
| 14.2 | Subsektor Penataan Kota dan Bangunan | Rp | 1.680.851.448,00 |
| 15 | Sektor Agama | Rp | 28.236.201.697,00 |
| 15.1 | Subsektor Pelayanan Kehidupan Beragama | Rp | 28.236.201.697,00 |
| 15.2 | Subsektor Pembinaan Pendidikan Agama | --- | |
| 16 | Sektor Ilmu Pengetahuan dan Teknologi | Rp | 42.929.743.725,00 |
| 16.1 | Subsektor Teknik Produksi dan Teknologi | Rp | 23.136.973.288,00 |
| 16.2 | Subsektor Ilmu Pengetahuan Terapan dan Dasar | --- | |
| 16.3 | Subsektor Kelembagaan Prasarana dan Sarana Ilmu Pengetahuan dan Teknologi | Rp | 15.114.006.244,00 |
| 16.4 | Subsektor Kelautan | Rp | 201.898.800,00 |
| 16.5 | Subsektor Kedirgantaraan | --- | |
| 16.6 | Subsektor Sistem Informasi dan Statistik | Rp | 4.476.865.393,00 |
| 17 | Sektor Hukum | --- | |
| 17.1 | Subsektor Pembinaan | | |

| | | |
|------|--|----------------------|
| | Hukum Nasional | --- |
| 17.2 | Subsektor Pembinaan Aparatur Hukum | --- |
| 17.3 | Subsektor Sarana dan Prasarana Hukum | --- |
| 18 | Sektor Aparatur Negara dan Pengawasan | Rp 47.585.687.048,00 |
| 18.1 | Subsektor Aparatur Negara | Rp 47.585.687.048,00 |
| 18.2 | Subsektor Pendayagunaan Sistem dan Pelaksanaan Pengawasan | --- |
| 19 | Sektor Politik, Hubungan Luar Negeri, Penerangan, Komunikasi dan Media Massa | --- |
| 19.1 | Subsektor Politik | --- |
| 19.2 | Subsektor Hubungan Luar Negeri | --- |
| 19.3 | Subsektor Penerangan, Komunikasi dan Media Massa | --- |
| 20 | Sektor Pertahanan dan Keamanan | Rp 56.958.197.907,00 |
| 20.1 | Subsektor Rakyat Terlatih dan Perlindungan Masyarakat | --- |
| 20.2 | Subsektor TNI | --- |
| 20.3 | Subsektor Kepolisian | --- |
| 20.4 | Subsektor Pendukung | Rp 56.958.197.907,00 |

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Pembiayaan dalam negeri sebesar Rp 18.900.000.000.000,00 terdiri dari :

- a. Privatisasi ---
- b. Penjualan aset program
restrukturisasi
perbankan Rp 18.900.000.000.000,00
- c. Penjualan obligasi
dalam negeri ---
- d. Pembiayaan perbankan
dalam negeri ---

Pembiayaan luar negeri bersih sebesar Rp 10.195.669.541.708,00 terdiri dari:

- a. Penarikan pinjaman Rp 17.818.422.856.341,00
luar negeri bruto
- Penarikan pinjaman Rp 848.797.957.000,00
program

- Penarikan pinjaman Rp 16.969.624.899.341,00
proyek
- Dikurangi dengan :
- b. Pembayaran cicilan Rp 7.622.753.314.633,00
pokok hutang luar
negeri

Pasal 6

Dalam hal pendapatan negara belum cukup untuk mencukupi kebutuhan belanja Pemerintah pada suatu periode tertentu, kekurangannya dapat ditalangi dari dana Sisa Anggaran Lebih, yang akan dikembalikan setelah pendapatan negara dalam tahun anggaran berjalan mencukupi.

Pasal 7

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4208